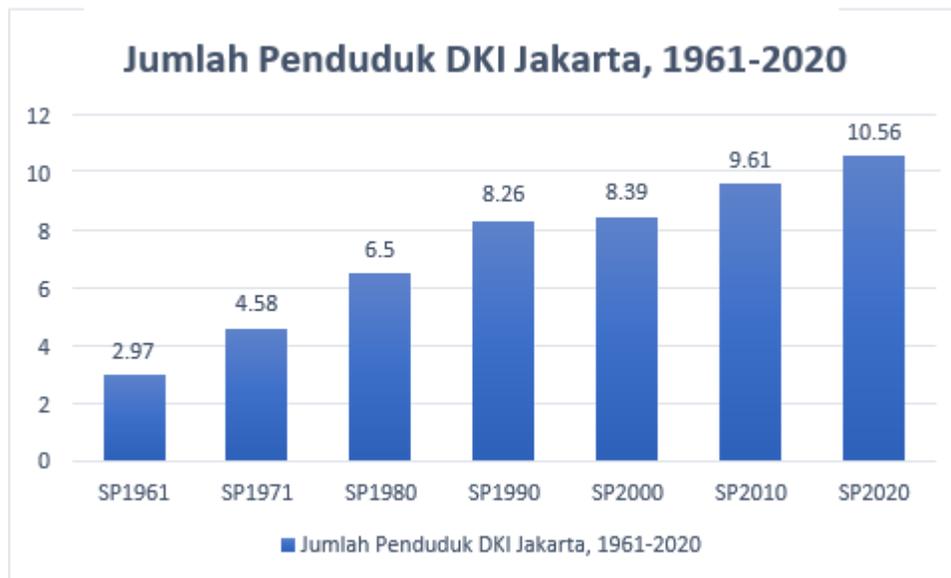


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 (peraturan.bpk.go.id, 2017) untuk menyesuaikan antara kebutuhan Lingkungan Alam dengan Pengembangan Jumlah Penduduk, khususnya di wilayah perkotaan, seperti diamanatkan pada pasal 20 ayat (4). Dilihat dari perkembangannya yang ideal, kota yang memenuhi syarat pertumbuhan yang layak merupakan kota yang perkembangannya dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan keseimbangan alam dengan jumlah penduduk. Seperti data yang ada pada kependudukan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI Jakarta), berdasarkan Sensus Penduduk 2020 tercatat bahwa DKI Jakarta pada bulan September 2020 memiliki penduduk sebanyak 10,56 juta jiwa (lihat gambar grafik 1.1). Data kependudukan tersebut dibandingkan dengan hasil sensus tahun 2010 penduduk sebelumnya, tercatat DKI Jakarta mengalami kenaikan rata-rata jumlah penduduk sebanyak 88 ribu jiwa setiap tahun. Bahkan selama jangka waktu sepuluh tahun, sejak tahun 2010 sampai tahun 2020, jumlah penduduk DKI Jakarta mengalami peningkatan menjadi sekitar 954 ribu jiwa (BPS SP 2020 DKI Jakarta Tahun 2021).



Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk DKI Jakarta

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 (jakarta.bps.go.id)

Berdasarkan data jumlah penduduk tersebut bila dikaitkan dengan kebutuhan ruang hijau di perkotaan bahwa pada jurnal terdahulu (Harahap, 2021:19) makin bertambahnya jumlah penduduk di kawasan perkotaan, akibatnya lahan hijau atau RTH justru beralih fungsi sebagai tempat pemukiman maupun pembangunan fisik lainnya. Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta dengan penduduk dan aktivitas yang padat membuat RTH sangat diperlukan demi menjaga keseimbangan lingkungan kota.

Dikutip dari berita harian Kompas.id (Nurfaizah, 2023) bahwa menurut Niken Prawestiti, Inisiator komunitas Ayo ke Taman menjelaskan penyediaan RTH merupakan kewajiban pemerintah daerah, seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.9 Tahun 2022 yang mengamanatkan kebutuhan RTH di Jakarta adalah 30 persen dari luas lahan yang ada. Adapun dari jumlah ini, 20 persen

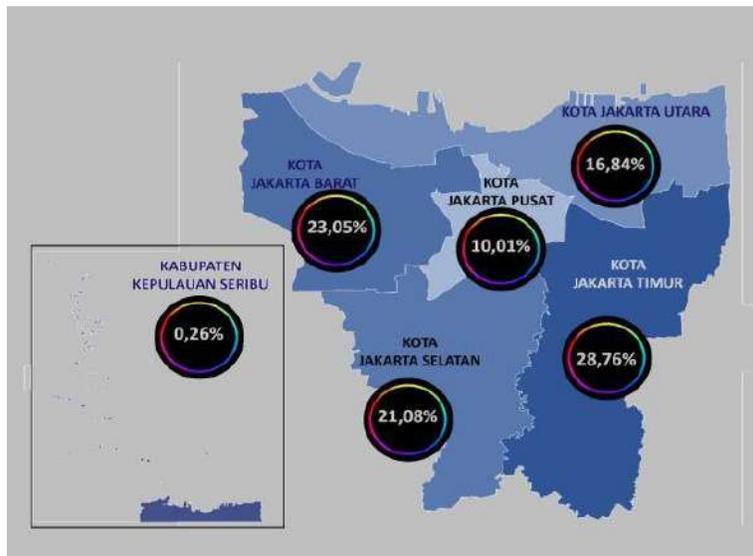
RTH publik dan 10 persen RTH privat. Menurut Niken Prawestiti mengatakan mengenai kebutuhan RTH bahwa saat ini masyarakat merasa kesulitan untuk menemukan ruang terbuka yang nyaman dan rindang untuk bermain serta bersosialisasi. Idealnya taman bisa diakses 10-15 menit berjalan kaki di rumah. Namun, di Jakarta, masyarakat sering harus menempuh jarak yang jauh dengan menggunakan kendaraan untuk sampai di taman, minimnya lahan di Jakarta merupakan faktor krusial bagi pengadaan taman. Maka dari itu, Niken sebagai Inisiator komunitas Ayo ke Taman menjelaskan agar taman bisa disediakan dalam jumlah banyak dengan lahan yang lebih kecil dan menyebar di berbagai tempat.

Sehingga dalam strategi penataan ruang lahan, sebuah ruang terbuka hijau dengan jumlah banyak, lahan kecil dan menyebar dapat dipergunakan sebagai keseimbangan lingkungan binaan dan lingkungan hidup alam. Menurut Peraturan Menteri PU No.5 Tahun 2008, ruang terbuka hijau berdasarkan kepemilikan memiliki dua jenis yaitu RTH publik dan RTH privat. RTH publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Sedangkan RTH privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas, berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Dalam Peraturan Menteri PU No.5 Tahun 2008 menjelaskan bahwa selain keterlibatan pemerintah dalam penyediaan RTH bagi lingkungan, keterlibatan masyarakat juga diperlukan pada pemanfaatan dan pengendalian RTH yaitu turut serta

dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman serta ikut menyediakan dan memelihara RTH di lahan perkarangan rumah, *berm*, dan lahan kosong lainnya dengan menanam berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot.

Baik RTH publik maupun privat memiliki fungsi sebagai penyumbang oksigen bagi lingkungan perkotaan dan perumahan warga, selain itu RTH publik juga sangat diperlukan sebagai ruang gerak hijau bagi publik apalagi di daerah Kota DKI Jakarta khususnya wilayah yang berpenduduk padat, di Jakarta Timur jumlah penduduk tercatat sebesar 3,04 Juta orang dengan persentase 28,76% (lihat gambar 1.2) dari jumlah penduduk di DKI Jakarta (BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021).



Gambar 1. 2 Persentase Jumlah Penduduk DKI Jakarta Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 (jakarta.bps.go.id)

RTH khususnya di wilayah perkotaan memiliki fungsi yang penting diantaranya terkait aspek ekologi, sosial budaya, dan estetika. Menurut (Imansari &

Khadiyanta, 2015:102) pada penelitiannya, berkaitan dengan fungsi secara ekologi, RTH berfungsi sebagai pengendali iklim yakni sebagai produsen oksigen, peredam kebisingan, dan juga sebagai *visual control* atau kontrol pandangan yaitu dengan menahan silai matahari atau pantulan sinar yang ditimbulkan. Adapun aspek sosial budaya, fungsi dari RTH diantaranya adalah sebagai ruang komunikasi dan interaksi sosial bagi masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui RTH yang bersifat publik. Selain sebagai ruang interaksi masyarakat, RTH publik juga memenuhi fungsi sebagai sarana rekreasi, olahraga, dan bahkan sarana pendidikan. Selain kedua aspek tersebut, RTH juga dapat berfungsi secara estetika diantaranya meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota, serta menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota. Agar suatu RTH publik dapat berfungsi secara optimal, tentunya perlu diperhatikan pemenuhan kriteria penyediaan sebagai ruang publik yang ideal seperti lokasi yang mudah dijangkau, nyaman, dan memberikan rasa aman bagi penggunanya.

Pembangunan RTH sangat diperlukan terutama di wilayah Jakarta Timur yang wilayahnya merupakan area terpadat dengan persentase 28,76% (BPS SP 2020 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021) oleh karena itu menurut Kementerian PU pada portal website (Kementerian PUPR, 2009) keberadaan RTH publik menjadi komponen dan aset penting dalam membentuk kota berkelanjutan. Selain menjadi tempat tumbuh tanaman, RTH merupakan wadah yang dapat menampung berbagai aktivitas warga di wilayah itu yang akan menumbuhkan nilai-nilai positif.

Dalam Pergub DKI Jakarta No.9 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pemerintah perlu dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan RTH pada lingkungan perkotaan

karena itu sebagai pemenuhan ketersediaan dan pemanfaatan RTH maka perlu dilakukan hal berikut ini:

1. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan luasan RTH
2. Penyediaan RTH
3. Penataan RTH
4. Pengembangan RTH
5. Pemeliharaan RTH
6. Pemanfaatan RTH

Pada penelitian ini melihat responsibilitas pemerintah atas penyelenggaraan RTH dari pemeliharaan yang dilakukan terhadap RTH. Dalam penyelenggaraan RTH publik khususnya taman publik di Kecamatan Duren Sawit yang bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan perawatan RTH taman publik adalah Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur.

Responsibility (Dwi Permana, 2017:5) merupakan keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa-apa yang telah diwajibkan kepadanya, namun tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Dari *responsibility* muncul istilah *responsible government* yang menunjukkan bahwa jenis-jenis pemerintahan dalam hal petanggungjawaban terhadap ketentuan atau undang-undang. Dari penjelasan tersebut, dalam Pergub DKI Jakarta No.9 Tahun 2022 bahwa penyelenggaraan pemeliharaan RTH dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah, pemerintah DKI Jakarta, sektor privat, dan partisipasi masyarakat. Serta menurut

Pergub DKI Jakarta No.49 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pemeliharaan dan pengamanan taman dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan perangkat daerah terkait, dalam hal ini Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur.

Sudin Pertamanan dan Hutan Kota mempunyai tugas membantu Dinas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pertamanan wilayah kota. Menurut data Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur, menunjukkan ada penambahan RTH sebanyak 10 taman selama dua (2) tahun. Pada Tahun 2019 ada penambahan delapan (8) taman. Masing-masing dua (2) taman di Kelurahan Bambu Apus dan Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung. Sementara masing-masing satu (1) taman di Kelurahan Cibubur dan Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas, Kelurahan Pondok kelapa Kecamatan Duren Sawit, dan Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar.

Sedangkan pada Tahun 2021 ada penambahan dua (2) taman yang terletak di Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman dan Kelurahan Kampung Rambutan Kecamatan Ciracas. Berdasarkan data tersebut sampai dengan Tahun 2021 di Jakarta Timur terdapat 224 taman (lihat tabel 1.2).

Tabel 1. 1 Luas RTH Taman Tahun 2021

Tahun	Luas Taman (m ²)
2018	632,972.05
2019	663,739.05
2020	663,739.05
2021	666,410.56

Sumber: Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur Tahun 2021

Tabel 1. 2 Jumlah Taman di Kecamatan Duren Sawit Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Taman
Jatinegara	20
Cakung	11
Cipayung	20
Ciracas	15
Kramat Jati	8
Matraman	5
Pasar Rebo	9
Makasar	16
Pulogadung	34
Duren Sawit	86
Total Taman	224

Sumber: Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur Tahun 2021

Berdasarkan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur, masyarakat bergantung kepada pemerintah dalam penyelenggaraan taman publik karena terdapat beberapa taman di Kecamatan Duren Sawit yang diserahkan masyarakat kepada pemerintah untuk dikelola dan dipelihara seperti Taman Seruni dan Taman Cempaka di Kelurahan Malaka Sari serta Taman Pondok Kelapa di Kelurahan Pondok Kelapa.

Pelaksanaan pemeliharaan taman merupakan penyelenggaraan fungsi dari tugas Sudin Pertamanan dan Hutan Kota dalam membantu sebagian urusan Dinas (Pergub DKI Jakarta No.157 Tahun 2019). Sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan

tugas dan fungsi Dinas melakukan kegiatan pemeliharaan taman agar taman tersebut terjaga fungsinya, sehingga dapat dinikmati masyarakat (tangerangkab.go.id, 2021). Tujuan dari pemeliharaan RTH taman publik yaitu untuk menjaga kebersihan tamannya agar dapat terjaga fungsinya sebagai peningkatan kualitas lingkungan dan kelestarian alam sehingga bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rene Sanjaya et al., 2021:5) menjelaskan bahwa pelaksanaan pemeliharaan taman yang perlu dilakukan adalah kegiatan penyapuan, penyiraman, pemangkasan, pemupukan, pendangiran, pengendalian hama, pemeliharaan *hardscape* taman, dan penyulaman taman. Semua kegiatan pemeliharaan taman tersebut perlu dilaksanakan secara intensif dengan kapasitas tenaga kerja yang dimiliki, hal tersebut agar pemeliharaan taman dapat terpenuhi dengan baik.

Pemeliharaan taman dimaksud untuk menjaga dan merawat areal taman dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya agar dapat mempertahankan keadaan semula sehingga taman tersebut dapat mempertahankan fungsi dan manfaatnya (Ayu et al., 2018:168). Pemanfaatan RTH pada Perda No 1 Tahun 2012 sesuai dengan fungsinya terdapat dua manfaat yaitu manfaat langsung dan tidak langsung untuk mencapai keteduhan, kesegaran, kesejukan, kenyamanan, keindahan, dan sebagai konservasi hayati, pembersih udara kotor yang efektif, serta pemeliharaan untuk penyimpanan ketersediaan air tanah.

Berdasarkan data Kota Jakarta Timur dalam angka 2022 (Jaktimkota.bps.go.id, 2022) menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Duren Sawit merupakan terbanyak kedua setelah Kecamatan Cakung yang ada di

Jakarta Timur, karena itu penyediaan RTH sangat diperlukan demi menjaga keseimbangan lingkungan alam dengan lingkungan binaan yang berguna untuk masyarakat (Peraturan Menteri PU No.5 Tahun 2008).

Menurut data (Jakartasatu.jakarta.go.id, 2018) menyebutkan bahwa wilayah Jakarta Timur memiliki jumlah taman yang banyak sebesar 61.61% dibandingkan dengan wilayah kota administrasi lainnya, Jakarta Selatan sebesar 26.64%, Jakarta Barat sebesar 6.05%, Jakarta Utara 5,59%, dan sisanya adalah Jakarta Pusat. Maka dari itu berdasarkan data (data.jakarta.go.id, 2017) dan Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Jakarta Timur memiliki banyak RTH dengan bentuk taman publik yaitu terdapat 86 taman dengan total luas taman sebesar 127.840 m² sedangkan taman yang berada di Kecamatan Pulogadung memiliki 34 taman, Kecamatan Jatinegara dan Cipayung 20 taman, Kecamatan Makasar 16 taman, Kecamatan Ciracas 15 taman, Kecamatan Cakung, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Kramat Jati, dan Kecamatan Matraman hanya memiliki sedikit taman. Taman yang berada di Kecamatan Duren Sawit letaknya tersebar dan berada di kompleks perumahan warga sehingga taman-taman tersebut sering dikunjungi dan digunakan oleh banyak orang, maka dari itu diperlukan pemeliharaan terhadap taman-taman tersebut agar tetap asri dan terjaga fungsi dan manfaatnya. Menurut Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pemelihara taman, ruang terbuka hijau taman di kompleks perumahan banyak digunakan oleh warga kompleks untuk berkegiatan sedangkan warga luar kompleks jarang ada yang memanfaatkannya.

Selain itu, warga kompleks sekitar Taman Malaka Sari menggunakan taman publik untuk kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang ketiga (*booster*) (lihat gambar dokumen kegiatan Vaksinasi per tanggal 6 April 2022).



Gambar 1. 3 Kegiatan Vaksinasi Di RTH Taman, 6 April 2022

Sumber: Dokumentasi peneliti di Taman Delima, 6 April 2022 Gambar 1.3 merupakan keadaan Taman Delima yang digunakan warga untuk menerima Vaksinasi *Booster* Covid-19 pada rabu 6 April 2022. Pada gambar tersebut warga menunggu giliran di tenda yang sudah disediakan.

Berdasarkan surat perintah kerja Sudin Pertamanan dan Hutan Kota administrasi Jakarta Timur, PJLP pemeliharaan RTH taman bertanggung jawab melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyapuan dan pembersihan areal taman
- b. Melakukan pemangkasan/pembabatan rumput di areal taman
- c. Melakukan pemangkasan semak dan tanaman hias
- d. Melakukan penggemburan tanah di sekitar tanaman hias
- e. Melakukan pengetrikan rumput dan tanaman penutup tanah
- f. Melakukan penyulaman dan penanaman tanaman hias, perdu dan pohon

- g. Melakukan perbanyak/pembibitan tanaman
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan
- i. Melaporkan dan mendokumentasikan hasil pekerjaan secara berkala.

Pada jurnal penelitian terdahulu yang dilakukan (Wijaya, 2018:12) berjudul “Strategi Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Preferensi Masyarakat Di Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur” didapati bahwa taman yang ada kurang terawat dan kebersihan taman masih kurang terjaga serta terdapat sarana dan prasarana yang rusak. Fasilitas penunjang untuk kegiatan warga juga masih kurang karena pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan warga. Hasil penelitian menyebutkan hanya 12% warga yang menjawab taman sudah bagus, sisanya cenderung menjawab cukup bagus, bahkan 40% warga menjawab kondisi taman yang ada masih kurang bagus dan belum bisa memenuhi kebutuhan mereka terhadap taman yang ada di lingkungan tersebut.

Selain itu, pada portal berita (beritajakarta.id, 2015) menjelaskan bahwa akibat minim perawatan maka taman yang berada di Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, dalam kondisi yang memprihatinkan. Pada taman tersebut terdapat rumput yang tinggi dan barang rongsokan dan ban bekas yang dapat mengganggu keasrian taman sehingga Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota perlu melakukan perawatan yang lebih maksimal terhadap taman tersebut, serta dalam berita juga mengimbau agar warga ikut merawat dan menjaga taman. Berdasarkan observasi awal, taman yang ada di Kecamatan Duren Sawit kotor oleh sampah daun kering dan sampah plastik. Demikian pula fasilitas seperti kursi taman, gazebo, dan lapangan

olahraga juga kurang perawatan. (lihat gambar dokumen per tanggal 5 April 2022).



Gambar 1. 4 Foto Kurang Terawat Taman Yang Kotor

Sumber: Dokumentasi peneliti di Taman Cempaka, 5 April 2022

Gambar 1.4 merupakan foto dari observasi awal, ditemukan tumpukkan sampah daun kering di Taman Cempaka Kecamatan Duren Sawit. Sampah di taman tersebut dibiarkan sehingga dapat mengurangi estetika taman.



Gambar 1. 5 Foto Kurang Terawat Fasilitas Taman Yang Kotor

Sumber: Dokumentasi peneliti di Taman Swadaya, 5 April 2022

Gambar 1.5 foto penampungan dan peresapan air yang rusak dan tidak terawat di Taman Swadaya Kecamatan Duren Sawit. Peresapan air tersebut seharusnya bisa digunakan untuk penampungan air hujan bagi warga sekitar.

RTH taman publik di Kecamatan Duren Sawit terdapat permasalahan pada pemeliharaannya, menurut (Hastuti et al., 2022:5) dalam jurnal penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tarakan” menjelaskan bahwa penyebab pemeliharaan belum maksimal dilakukan karena kurangnya dilakukan sosialisasi pemerintah dengan masyarakat mengenai pentingnya ruang terbuka hijau bagi kehidupan masyarakat kota serta sebagai pembentuk ruang nyaman bagi warga yang bertempat tinggal di sekitar RTH dan tempat untuk melakukan berbagai aktivitas kegiatan. Peran serta aktif masyarakat sangat diperlukan untuk pemeliharaan taman agar taman bisa dimanfaatkan sebagai sarana olahraga, rekreasi, dan sosial bagi warga (Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012)

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, maka peneliti menemukan permasalahan bahwa meskipun pemerintah sudah membangun RTH taman publik di Kecamatan Duren Sawit namun masih terdapat permasalahan dalam pemeliharaannya. Dalam hal ini pemeliharaan RTH taman publik perlu dilakukan dan diperhatikan oleh pemerintah daerah hal ini dijelaskan pada Perda DKI Jakarta No. 1 tahun 2012 (jdih.jakarta.go.id, 2022) bahwa pemeliharaan lingkungan dilakukan untuk mempertahankan kualitas suatu lingkungan yang sudah baik agar tidak mengalami penurunan kualitas lingkungan. Berdasarkan penjelasan atas fenomena yang terjadi di atas mengenai RTH taman publik, maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut: **Mengapa pemerintah kurang maksimal dalam memelihara RTH taman publik di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur?**

Penelitian ini menganalisis responsibilitas pemerintah dalam pemeliharaan RTH taman publik di wilayah Kecamatan Duren Sawit, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung. Oleh karena itu, pada penelitian ini mengambil judul **“Responsibilitas Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang yang disebutkan di atas, terdapat masalah yang dapat diidentifikasi berikut ini:

1. Taman di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur yang berfungsi sebagai ruang publik kurang terpelihara secara maksimal oleh pemerintah
2. Fasilitas taman seperti kursi taman dan sarana olahraga rusak serta sampah daun yang berserakan
3. Kurangnya sarana prasarana penunjang bagi warga untuk melakukan berbagai kegiatan di taman

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya:

1. Bagaimana responsibilitas Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam pemeliharaan RTH taman publik di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat responsibilitas Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam pemeliharaan RTH taman publik di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai responsibilitas Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di ruang terbuka hijau taman publik di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, yaitu:

1. Menganalisis responsibilitas Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam pemeliharaan RTH taman publik di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat responsibilitas Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam pemeliharaan RTH taman publik di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yakni dampak pencapaian dari sebuah tujuan. Melalui uraian dan pembahasan penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat dalam pengembangan studi Administrasi Publik dengan memperkaya kajian ilmiah yang menjadi bahan referensi dalam penelitian lainnya terutama yang berkaitan dengan responsibilitas pemerintah dalam pemeliharaan RTH taman publik di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa memperbanyak wawasan dan pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti sendiri. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi dalam bidang keilmuan metode penelitian dan bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi kepentingan yang sama bagi akademisi, yaitu informasi, referensi dan bagi pihak-pihak lain mengenai ruang terbuka hijau.

b. Bagi Masyarakat

Pada penelitian ini memberikan penjelasan informasi berupa pemeliharaan dan kebermanfaatan RTH taman publik. Serta bisa digunakan sebagai acuan masyarakat untuk melihat seberapa besar responsibilitas pemerintah dalam memelihara RTH taman publik di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian bermanfaat untuk bahan evaluasi dan acuan pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas RTH taman di Kecamatan DurenSawit dan sebagai tolak ukur untuk menilai responsibilitas terhadap pemeliharaan RTH taman bagi publik sehingga nantinya dari penelitian ini bisa menjadi perhatian yang penting untuk pemerintah dalam pemenuhan RTH taman serta pemeliharaan RTH taman bisa maksimal agar dapat digunakan bersama sampai jangka waktu yang lama.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini untuk memperkaya konsep maka digunakan penelitian terdahulu sebagai acuan. Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui metode penelitian dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian. Pada penelitian terdahulu, tidak ditemukan judul yang sama dengan judul penelitian ini. Tetapi, penelitian ini mengangkat beberapa penelitian yang dapat dirujuk sehingga bisa memperbanyak bahan penelitian. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	I Wayan Agus Rene Sanjaya.dkk. Jurnal Arsitektur Lansekap. Vol. 7, No. 1. (2021). “Evaluasi Pemeliharaan Taman di Areal Jogging Track dan Playground, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung”	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemeliharaan taman di area jogging track dan playground di Pusat pemerintahan Badung	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi dan wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil evaluasi pelaksanaan pemeliharaan taman berdasarkan penghitungan kapasitas kerja ideal terdapat dua pekerjaan yang kurang dari standar yaitu kegiatan penyapuan dan pemupukan. • Permasalahan terdapatnya kegiatan pemeliharaan yang kurang dari standar disebabkan para pekerja menunda pekerjaan, kerusakan alat kerja, teknik pemeliharaan yang digunakan oleh setiap individu gardener berbeda-beda dan perbedaan kondisi lahan di setiap unit.
2.	Faisal Vidi Wijaya. Jurnal repository.its.ac.id (2018). “Strategi Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Publik berdasarkan Preferensi Masyarakat di Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur”	Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi optimalisasi RTH Publik di Kelurahan Pondok Kelapa berdasarkan preferensi masyarakat. Sasaran yang akan disusun ialah mengidentifikasi karakteristik RTH Publik di Kelurahan Pondok Kelapa, menganalisis kebutuhan masyarakat	Metode analisis yang akan digunakan berupa analisis kualitatif dan analisis Delphi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya partisipasi masyarakat dalam pengembangan RTH Publik di Kelurahan Pondok Kelapa khususnya pengembangan Taman Lingkungan (H2), diharapkan penggunaan RTH dapat lebih maksimal. Dalam hal tersebut, pemerintah sebagai pihak yang secara langsung dalam membangun dan mengelola RTH Publik di Kelurahan Pondok Kelapa diharapkan dapat menangkap preferensi mereka mengenai RTH Publik apa yang sekiranya cocok dibangun pada lingkungan mereka. Selain itu, pemerintah diharapkan melakukan pengawasan secara berkelanjutan agar optimalisasi yang dilakukan dapat berjalan optimal.

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>terhadap fungsi RTH Publik di Kelurahan Pondok Kelapa, menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi RTH di Kelurahan Pondok Kelapa dan sasaran terakhir yaitu merumuskan strategi optimalisasi RTH Publik di Kelurahan Pondok Kelapa</p>		
3.	<p>Deasy Arlistasari dan Hj. Weni Rosdiana. Jurnal Publika. Vol. 7, No. 2. (2019). “Evaluasi Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Kota Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”</p>	<p>Tujuan dari penelitian untuk mengevaluasi terhadap penataan ruangterbuka hijau di kawasan kota khususnya Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik</p>	<p>Penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan dana dari pemerintah kota untuk pengelolaan RTH dan terbatasnya peralatan untuk penataan tersebut membuat pekerjaan tersebut tidak efisien dalam hal tenaga dan waktu. • Kurangnya fasilitas taman di KecamatanKebomas serta banyaknya taman di Kecamatan Kebomas yang belum dikembangkan menyebabkan taman-taman tersebut tidak terawat dengan baik.
4.	<p>Agnesia Agustin Medja.dkk. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 6, No.97.</p>	<p>Tujuan penelitian ini menjelaskan penerapan tanggung jawab kerja dalam meningkatkan</p>	<p>Di dalam penelitian ini memakai penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan tanggung jawab operasional dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat digambarkan dengan dimensi.

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	(2020). “Penerapan Responsibilitas Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Halmahera Barat”	kinerja aparatur pelayanan publik	observasi, wawancara, dan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas tidak didukung dengan ketersediaan personil yang memadai dan gedung kantor yang belum representatif. Pemberian wewenang sebagaimana tugas dan fungsi selalu memperhatikan program kerja tahunan, keputusan dan peraturan yang berlaku. • Evaluasi kinerja organisasi dilakukan atas dasar kriteria penilaian kinerja, namun dalam pelaksanaannya menghadapi keterbatasan jaringan internet. Pekerjaan pelayanan dilakukan secara akurat, adil dan tepat waktu, tercermin dari penerapan pelayanan sesuai dengan SOP dan kode etik, serta pengaduan yang diterima ditindaklanjuti dengan segera. • Karyawan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik diberikan sanksi berupa teguran atau peringatan tertulis.
5.	Astri Dwi S. Dkk. Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik. Vol.7 No.1. (2020). “Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi Layanan Publik”	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat responsibilitas dalam pelayanan serta menilai kinerja dari pegawai dan kualitas pelayanan yang dihasilkan.	Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan untuk mendapatkan data yang di butuhkan penelitian ini melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan prinsip responsibilitas pada Kantor Pengelola Keuangan Daerah Bengkulu dapat dilihat pada sejauh mana kegiatan Kantor Pengelola Keuangan Daerah Bengkulu dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat • Kendala yang dapat ditemukan dalam tanggung jawab ini adalah pelayanan yang diberikan kurang memuaskan kepada masyarakat karena fasilitas

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu belum lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya panasnya ruangan pelayanan publik, kurangnya tempat duduk, dan lain lain.
6.	Syadza Qonitha Hazimah. Jom FISIP Vol. 4, No. 2. (2017). “ Responsibilitas PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ”	Tujuan penelitian untuk mengetahui Responsibilitas dan faktor- faktor yang mempengaruhi Responsibilitas PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggung jawab ekonomi terpenuhi dan masyarakat dapat mengembalikan pinjaman dengan cara mencicil tanpa harus menanggung beban bunga. • Tanggung jawab hukum melampaui kewajiban hukum dan berinvestasi dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi lingkungan. • Tanggung jawab etis mencakup menjunjung tinggi nilai-nilai supremasi hukum dan kemanusiaan, bertindak secara etis, serta menjaga citra perusahaan di mata masyarakat. • Tanggung jawab diskresi diwujudkan dalam berbagai tindakan dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. • Kurangnya respon positif dan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program CSR menjadi faktor yang mempengaruhi.
7.	Iin Rosalyn Detuage, Abd. Mufti Radja, dan Ria Wikantari. Nature: National	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pemanfaatan ruang pada Taman	Metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat fasilitas dan sarana pada Taman Macini Somabala yang berguna untuk kegiatan perempuan, lansia maupun siswasehingga taman ini tidak efektif digunakan.

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>Academic Journal of Architecture, Vol.6 No.2. (2019).</p> <p>“Evaluasi Efektifitas Pemanfaatan Taman Maccini Sombala Sebagai Ruang Terbuka Publik Menurut Kebutuhan Masyarakat”</p>	<p>Maccini Sombala Makassar, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi efektifitas pemanfaatan fasilitas taman dan menganalisis efektifitas pemanfaatan fasilitas penunjang taman.</p>	<p>dan observasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak fasilitas yang mendukung taman rusak dan tidak dapat digunakan karena pengabaian oleh pengelola taman. Perlu adanya kegiatan rutin di Taman Masinisongbara yang dapat menarik minat masyarakat. asilitas taman seperti tempat duduk, toilet, danpenerangan perlu dirawat dan diperbaiki.
8.	<p>Alak Paul, Tapan Kumar Nath, Sharifa Jahan Noon, Mohammad Mohaiminul Islam, dan Alexander Mark lechner. Journal of Department of Geography and Environmental Studies, University of Chittagong. Vol. 55. (2020).</p> <p>“Public Open Space, Green Exercise and Well-being in Chittagong,</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manfaat apa saja yang di dapat oleh pengunjung ruang terbuka atau taman publik saat menghabiskan waktunya di tempat tersebut</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan kuantitatif. Pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, kuesioner, dan wawancara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengunjung yang menghabiskan waktunya di ruang terbuka hijau ini dapat mengatasi beberapa masalah kesehatan seperti obesitas, hipertensi, diabetes, dan kesehatan mental. • Pengunjung memanfaatkan aktivitas kegiatan fisik yang dilakukan di ruang terbuka publik ini dengan berkontribusi pada pembentukan asosiasi informal dan interaksi sosial yang penting untuk mempertahankan gaya hidup sehat. • Minimnya ruang terbuka untuk publik di Bangladesh masih menjadi permasalahan bagi pemerintahnya. • Dengan adanya kegiatan di ruang terbuka publik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta adanya pembentukan asosiasi informal dan interaksi sosial yang penting untuk mempertahankan gaya hidup sehat.

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Bangladesh</i>			<ul style="list-style-type: none"> • Pengunjung ruang terbuka publik cukup senang dengan hal ini namun masih ada masukan dari masyarakat tentang perbaikan pada toiletnya dan fasilitas pengolahan limbahnya.
9.	Joseph Adeniran Adedeji dan Joseph Akinlabi Fadamiro. Management of Environmental Quality: An International Journal. Vol. 26 No. 6. (2015). <i>“Urban Open Space Transition and Management In Lagos, Nigeria”</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menila dan mengevaluasi kualitas fisik dan karakteristik lanskap ruang terbuka publik yang telah mengalami transisi.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, pengumpulan data menggunakan teknik survei, pengambilan sampel acak, wawancara.	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa estetika dan kualitas luar ruangan perkotaan atau ruang terbuka publik telah dibawa ke kota Lagos di Nigeria melalui transisi lanskap perkotaan yang sangat berarti untuk kegiatan rekreasi publik di kota sebagai sarana penting untuk meningkatkan kehidupan di perkotaan. • Para pengguna ruang terbuka atau taman ini dapat mengambil manfaat untuk meningkatkan kesejahteraannya. • Taman ini masih belum optimal dalam pemeliharannya terdapat fasilitas seperti toilet yang kurang terawat.
10.	Sarah Abdulkareem Salih dan Sumarni Ismail. International Journal of Architectural Research. (2020). <i>“Pocket Parks For Promoting Social Interaction Among Residents Of Baghdad City”</i>	Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengidentifikasi jenis dan karakteristik ruang terbuka publik untuk meningkatkan aktivitas sosial warga di Kota Baghdad.	Metode penelitian yang digunakan kuantitatif, teknik pengumpulan data survei kuesioner.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan untuk menyediakan taman publik sebagai tempat untuk berinteraksi sosial penduduk di kota Baghdad. • Taman kantong yang menyediakan penghijauan dapat meningkatkan komunitas lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk seperti manfaat kesehatan, mental, sosial. • Perlunya penyediaan taman kantong atau ruang terbuka hijau dengan karakteristik yang memadai untuk mempromosikan interaksi sosial penduduk di Kota Baghdad. Tujuan pemanfaatan dari taman

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>kantong yang menyediakan penghijauan yang efisien adalah untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari berbagai kelompok pengguna. Dengan adanya taman saku dapat mempromosikan manfaat kesehatan, mental, sosial, dan lingkungan bagi kota dan penduduknya selain itu juga dapat meningkatkan interaksi sosial luar ruangan dalam konteks lokal kota- kota yang padat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namun, beberapa kota yang kekurangan taman kantong yang dirancang dengan baik di dekat tempat tinggal mereka, menyebabkan kurangnya interaksi sosial antar penduduk terutama saat di luar ruangan.

1.6.2 Manfaat Jurnal Terdahulu Bagi Peneliti

Manfaat penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika peneliti melaksanakan sebuah penelitian dan sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Berdasarkan hasil temuan yang diolah oleh peneliti dari beberapa penelitian terdahulu bahwa ruang terbuka hijau di perkotaan sangat diperlukan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ruang untuk menunjang berbagai aktivitas sosial. Namun dari beberapa jurnal tersebut masih disebutkan bahwa pemeliharaan dan perawatan taman-taman tersebut kurang dilakukan sehingga banyak fasilitas taman yang rusak dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Jurnal penelitian mengenai responsibilitas digunakan peneliti sebagai bahan acuan untuk mencari tahu konsep responsibilitas yang sesuai dengan judul penelitian penulis. Serta dari beberapa jurnal internasional yang diolah penulis sebagai bahan untuk penelitian, menyebutkan ruang terbuka hijau di perkotaan yang padat bisa digunakan sebagai tempat berinteraksi sosial untuk mempertahankan gaya hidup yang sehat selain itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan antar warganya sehingga nantinya ruang terbuka hijau di perkotaan dapat digunakan untuk memandu perencanaan kota berkelanjutan di masa depan.

Dalam pelaksanaannya seperti pada penelitian yang berjudul “Evaluasi Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Kota Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik” mendeskripsikan bahwa dalam hal tenaga dan waktu tidak efisien karena terbatasnya sumber dana yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk penataan

RTH dan terbatasnya peralatan kerja. Selain itu, ada juga masalah pemeliharaan taman yang tidak merata, karena masih banyak taman di kecamatan Kevomas yang tidak memiliki fasilitas taman dan tidak terawat dengan baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang terdapat pada tabel 1.3, memiliki persamaan tema antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu ruang terbuka hijau (RTH) taman publik hingga saat ini hanya terdapat penelitian mengenai penataan dan pemanfaatan RTH taman publik, namun dari penelitian tersebut bisa diketahui bahwa pemeliharaan RTH taman publik berpengaruh pada pemanfaatan RTH taman publik. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini akan membahas mengenai pemeliharaan RTH taman publik dari sisi tanggung jawab pemerintah atau Sudin Pertamanan dan Hutan Kota yang sebelumnya penelitian ini belum pernah dilakukan.

1.6.3 Administrasi Publik

Administrasi publik terdiri dari dua suku kata yaitu administrasi dan publik. Administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *ad* yang artinya *intensif* dan *ministrare* yang artinya adalah melayani (to serve).

Menurut Chandler dan Plano administrasi publik merupakan proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (Keban, 2014:8)

Menurut Nicholas Henry administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga

mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial (Pasolong, 2014:28).

Dari beberapa definisi administrasi publik di atas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Nicholas Henry mengemukakan 5 (lima) paradigma administrasi publik sebagai berikut (Pasolong, 2014:28):

1. Paradigma Dikotomi Politik Administrasi (1990-1926)

Lokus paradigma ini adalah mempermasalahkan dimana seharusnya administrasi negara ini berada. Pada masa ini dibedakan dengan jelas antara administrasi dan politik negara. Tonggak sejarah sebagai momentum dari fase ini adalah tulisan dari Frank J. Goodnow dan Leonald D. White di dalam bukunya *Politics and Administration*, ia berpendapat bahwa ada 2 (dua) fungsi pokok pemerintahan yang amat berbeda satu sama lain. Dua fungsi pokok yang dimaksud adalah politik dan administrasi.

2. Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Pada paradigma ini lokus dari administrasi negara tidak merupakan masalah dalam paradigma ini karena yang lebih dipentingkan adalah fokusnya yaitu prinsip-prinsip administrasi, dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Pada masa ini administrasi memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Prinsipnya adalah administrasi negara dapat diterapkan di negaramana saja walaupun berbeda kebudayaan, lingkungan, visi dan lainnya. Prinsip administrasi yang terkenal dari Gulick & Urwick (Pasolong, 2014:35) adalah POSDCORB (Planning,

Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting).

3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Sebagai akibat dari perhatian dan kritik-kritik konseptual yang mengalir, administrasi negara melompat ke belakang dengan serta merta ke dalam induk disiplin ilmu politik. Hasilnya adalah diperbaharainya kembali penentuan lokus yaitu birokrasi pemerintah tetapi dengan demikian kehilangan fokusnya. Pendek kata; tahap penentuan ketiga ini sebagian besar merupakan usaha menetapkan kembali kaitan-kaitan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Ada dua perkembangan yang terjadi selama periode ini yang cukup mencerminkan adanya perbedaan dalam masalah cara mengurangi ketegangan antara para ilmuwan administrasi dan ilmuwan politik secara berangsur-angsur: peningkatan penggunaan studi kasus sebagai instrumen epistemologi, perbandingan dan pembangunan administrasi yang mana mengalami pasang surut sebagai sub-bidang administrasi negara. Administrasi negara lintas budaya (*crosscultural public administration*) yang disebut juga pendekatan komparatif, merupakan bidang baru dari administrasi negara. Perbandingan administrasi negara, sebagaimana diterangkan Ferrel Heady, memusatkan pada lima permasalahan motivasi sebagai kegiatan ilmiah; pencarian teori; dorongan bagi aplikasi praktis; sumbangan bagi perluasan perbandingan politik; perlunya peneliti yang terlatih dalam tradisi hukum administrasi dan analisa perbandingan berbagai berbagai masalah administrasi yang ada. Administrasi negara mempunyai dua perbedaan, dengan masing-masing mempunyai kajian perbandingan sub-bidangnya.

4. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970)

Pada masa ini administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi. Perkembangan ini diawali dengan ketidaksenangan bahwa ilmu administrasi dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu politik. Pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan focus, tetapi tidak ada locusnya.

5. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-Sekarang)

Pada masa ini administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara, yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan, dan ekonomi politik. Beberapa departemen, fakultas dan akademi baru administrasi negara dan public affairs bermunculan. Salah satu bentuk trend dari pertumbuhan administrasi negara ini adalah terbentuknya asosiasi nasional dari fakultas-fakultas tersebut (*The National Association Of School Of Public Affairs And Administration*). Administrasi negara semakin menonjol bukan hanya karena diakui kalangan universitas sebagai bidang akademik yang tersendiri (di banyak tempat, ilmu ini tak hanya diajarkan sebagai sebuah jurusan, tapi bahkan berupa sebuah perguruan tinggi tersendiri), tapi bidang itu sendiri merupakan getaran semangat akademik, dan merupakan isyarat awal dari perubahan sosial. Jika negara harus ditangani dengan baik, menurut Rektor Harvard, Bok, maka pihak universitas harus berperan langsung dalam proses pembentukan sikap dan pemikiran para abdi negara tersebut.

6. Paradigma Governance (1990-sekarang)

Paradigma Governance menekankan terciptanya interaksi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah, serta menekankan hal-hal seputar mekanisme dan proses yang seluruh stakeholder yang terlibat diizinkan untuk menunjukkan kepentingannya, melakukan mediasi terhadap berbagai perbedaan yang terjadi, dan menjalankan hak dan kewajibannya.

1.6.4 Manajemen Publik

Manajemen dapat diartikan dalam beberapa pandangan (Rohman, 2018) sebagai berikut:

1. Manajemen dipandang sebagai suatu proses mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui interaksi sumber daya-sumber daya dan pembagian tugas dengan profesional
2. Manajemen dipandang sebagai upaya-upaya yang dilakukan orang untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi melalui proses optimasi sumber daya manusia, material dan keuangan
3. Manajemen dipandang sebagai bentuk koordinasi dan pengintegrasian dari berbagai sumber daya (manusia dan cara) untuk menyelesaikan tujuan-tujuan khusus dan tujuan-tujuan yang bervariasi (umum)
4. Manajemen dipandang sebagai suatu bentuk kerja yang melingkupi koordinasi sumber daya-sumber daya manusia-tanah, tenaga kerja, dan modal untuk menyelesaikan target-target organisasi

Dari beberapa pandangan yang dikemukakan di atas tersebut, pada intinya merujuk pada suatu kesimpulan pokok, yaitu adanya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, baik tujuan yang bersifat khusus maupun tujuan yang bersifat umum. Pencapaian tujuan organisasi dilakukan dengan cara interaksi, koordinasi, pengintegrasian, dan pembagian tugas secara profesional dan proporsional untuk mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia (tenaga kerja), material (tanah), keuangan (modal), maupun cara yang digunakan. Dalam konteks ini, profesional dimaknai sebagai bentuk pembagian tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan sumber daya-sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Sedangkan proporsional dimaknai sebagai pembagian tugas yang seimbang antara kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya dengan beban kerja yang harus ditunaikan. Sehingga dengan upaya ini, setiap sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut tidak kelebihan beban yang akan berakibat pada lambannya pencapaian tujuan dimaksud bahkan terjadi kegagalan.

Menurut Atmosudirdjo (dalam Rohman, 2018:10) mengemukakan bahwa manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta (suatu yang harus dicapai) atau tujuan kerja yang tertentu.

1.6.5 Responsibilitas Pemerintah

Menurut (Azheri, 2012:86) responsibilitas adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban atau putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan

memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.

Selain itu, tanggung jawab menurut Friedrich (Widodo, 2001:149) merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional atau kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Birokrasi publik dinilai bertanggung jawab (*responsible*) jika pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi.

Menurut (Ndraha, 2003:87) menyebutkan Responsibility (tanggung jawab) berasal dari akar kata latin respons (us). Lebih jauh Ndraha menjelaskan bahwa tanggung jawab merupakan salah satu mata rantai, dan mata rantai terpenting, yang berhubungan dengan perintah, janji (*commitment*), dan status, dengan percaya dalam hubungan pemerintahan.

Sejalan dengan di atas, (Dwiyanto, 2006:50) menjelaskan tentang tanggung jawab, adalah apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Dwiyanto pun menjelaskan pengertian tanggung jawab merupakan tanggung jawab birokrasi publik dalam melaksanakan tugas pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan kebutuhan publik. Tanggung jawab (tanggung jawab) adalah tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugasnya yang berhubungan dengan perannya sebagai pelaksana tugas pelayanan kepada pihak yang dilayani.

Menurut (Islamy, 2009:45) dalam bukunya bahwa tanggung jawab subjektif lebih mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam *equity* (hak

menurut keadilan/kewajaran), *equity* (persamaan hak), *fairness* (kejujuran) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas administrasi lainnya. Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam sebuah hasil kajian pusat penelitian dan pengawasan (puslitbangwas) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2006 (Website resmi bpkp.go.id) mengenai pengawasan ukuran penilaian GEG (*Good Executive Governance*) yang menghasilkan prinsip responsibilitas menyebutkan enam indikator, yaitu :

1. Kejelasan tanggung jawab dan wewenang
2. Memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang
3. Memiliki kebijakan pengelolaan SDM (sumber daya manusia)
4. Memiliki kebijakan pengelolaan keuangan
5. Memiliki kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana
6. Memiliki kebijakan mengenai metode kerja.

Dalam (Cooper, 2012:58), responsibilitas adalah kunci dari konsep pengembangan etika dalam peranan administrasi. Terdapat dua jenis reponsibilitas disebut sebagai responsibilitas subjektif dan responsibilitas objektif. Responsibilitas objektif harus dilakukan dengan tuntutan dari luar diri kita, sedangkan responsibilitas subjektif yaitu terfokus pada hal-hal yang membuat seseorang merasa bertanggung jawab.

Mosher, 1968 dan Winter, 1966 (Cooper, 2012:59) menyebutkan bahwa terdapat dua jenis tanggung jawab yaitu

1. Tanggung Jawab Objektif

Bentuk spesifik dari tanggung jawab objektif menyangkut dua dimensi yaitu akuntabilitas dan kewajiban. Semua hal mengenai tanggung jawab objektif melibatkan pertanggungjawaban kepada seseorang atau badan kolektif, dan tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu, bawahan, dan terhadap pencapaian tujuan. Bermula pada akuntabilitas dan berakhir dengan kewajiban. akuntabilitas dan kewajiban menyangkut tanggung jawab kepada orang lain, hal ini adalah dimensi ganda dari tanggung jawab objektif administrasi. Dalam hal kepentingan umum kewajiban adalah hal yang lebih mendasar dan akuntabilitas adalah cara untuk memastikan pemenuhan kewajiban dalam sebuah tingkatan struktur. akuntabilitas menyiratkan hubungan bawahan dan atasan dan kewenangan dari atas ke bawah dalam mengatur kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama (Cooper, 2012 : 67). Jika kita menjelaskan dua aspek tanggung jawab objektif dalam konteks organisasi dan politik pada administrasi publik, kita dapat menegaskan hubungan dari tanggung jawab yang diciptakan antar aktor dalam proses kebijakan.

Beberapa indikator yang kemudian dapat melihat sejauhmana proses pertanggungjawaban dari seorang administrator dalam menjalankan kewajibannya yaitu dapat dilihat dari tiga macam pelaksanaan kewajiban untuk pemenuhan tanggung jawab berikut ini :

- a. Bertanggung jawab kepada pimpinan berdasarkan hukum yang berlaku

Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan dengan mematuhi peraturan yang berlaku sebagai salah satu masalah dalam tanggungjawab objektif. Seseorang dianggap perlu untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan keinginan pimpinan dalam arti pimpinan memiliki kekuasaan penuh atas diri anda. Tanggungjawab objektif melibatkan akuntabilitas kepada orang lain dan pemenuhan kewajiban bagi standar tertentu yang berlaku dalam sebuah kategori kinerja.

Tanggungjawab objektif umumnya menekankan pada kewajiban yang harus dijalankan bagi semua orang yang menduduki setiap jenis jabatan atau posisi tanpa upaya untuk mendahulukan kebutuhan individual, keterbatasan, preferensi, atau pelaksanaan kewajiban tertentu. Sebagai administrator publik, *responsible to the law* atau *responsible* terhadap hukum atau peraturan yang mengatur organisasi dan perilaku merupakan salah satu bentuk mewujudkan tanggungjawab objektif. Hukum sebagai sumber objektif dari tanggungjawab seorang administrator publik seperti halnya: aturan dan kebijakan organisasi, uraian tugas resmi, dan standar profesional. Pada akhirnya, *responsible* terhadap hukum menjadi kewajiban di dalam menegakkan konstitusi. Konstitusi dan beberapa pasal yang mengikat kepada warga negara yang bekerja pada pelayanan publik adalah perlu untuk dilaksanakan. *Responsible* terhadap hukum adalah pedoman dan acuan bagi organisasi publik dan pelayanan publik bahwa mereka berada dan bekerja atas nama publik.

Pada tanggungjawab objektif, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus memiliki acuan hukum atau peraturan yang berlaku agar sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan tersebut.



Gambar 1. 6 Peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan RTH taman publik

Sumber: peraturan.bpk.go.id

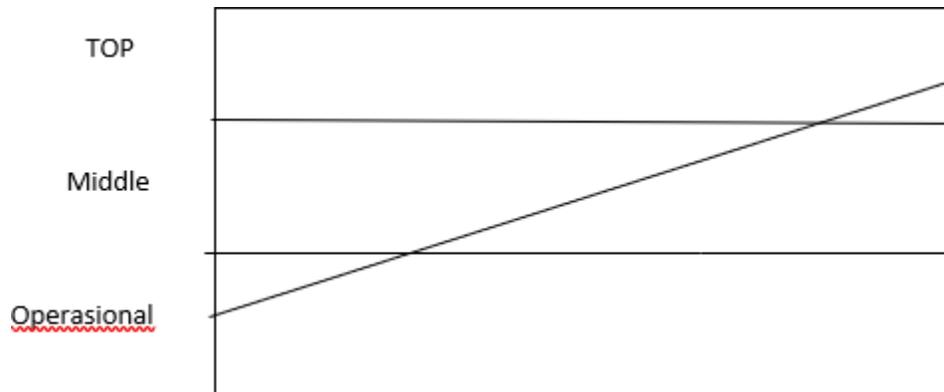
Adanya peraturan tersebut maka Sudin Pertamanan dan Hutan Kota menurut tanggung jawab objektif, wajib dan bertanggung jawab untuk melakukan penyelenggaraan pemeliharaan taman sesuai peraturan karena hal ini berkaitan dengan tanggung jawab kepada pimpinan terhadap hukum yang berlaku.

b. Bertanggung jawab terhadap atasan dan bawahan

Di samping hukum, tanggung jawab objektif yang paling menonjol dialami adalah struktur pertanggungjawaban berjenjang dari organisasi tempat anda bekerja, seperti tanggung jawab kepada atasan organisasi dan tanggung jawab untuk pelaksanaan kewajiban bawahan. Dalam (Muslimah, 2016:16) Paul Appleby berpendapat bahwa hierarki atau tingkatan adalah struktur yang bersifat formal dan bagian dari tanggung jawab. Rantai komando dengan perwakilan berjenjang dari sebuah organisasi adalah sarana dari peraturan yang diperkirakan dalam program dan

pelayanan.

Pada Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur memiliki struktur atasan dan bawahan dalam organisasi yaitu



Gambar 1. 7 Struktur atasan dan bawahan dalam organisasi pertamanan dan hutan kota

Keterangan:

Top : Gubernur DKI Jakarta dan Sekda provinsi DKI Jakarta

Middle : Dinas Pertamanan dan Hutan kota serta Sudin Pertamanan dan Hutan Kota

Operasional : Seksi taman dan hutan kota, Satuan pelaksana kecamatan, dan PJLP pemelihara taman

c. Bertanggung jawab kepada masyarakat

Bentuk ketiga dari tanggung jawab objektif menurut Held (Cooper, 2012:65) adalah kewajiban untuk melayani kepentingan publik. apakah dengan sumpah jabatan, kode etik, atau mandat, semua administrator publik bertanggung jawab untuk menilai perilaku mereka dalam hal kepentingan umum. Hasilnya adalah administrator publik

dihadapkan dengan berbagai alternatif untuk mewujudkan kepentingan umum, bebas melaksanakannya, dan diharapkan untuk melayani kepentingan umum meskipun jauh dari dasar dan bagian responsibilities objektif baik itu dalam hal kemauan dari pejabat terpilih dalam hukum yang berlaku atau komando di setiap rantai organisasi. Waldo (dalam Cooper, 2012:69) mengatakan bahwa kewajiban utama untuk melayani kepentingan publik warga negara menyebabkan administrator bagaimanapun harus mengedepankan semua kepentingan yang ada untuk dilaksanakan, harus mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di atas diri pribadi, keluarga, kelompok, atau suku di dalam memberi keputusan.

Dalam hal ini pada Pergub 49 Tahun 2021 (jdih.jakarta.go.id, 2021) pemerintah perlu bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan mengajak keterlibatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan taman. Selain pemerintah yang harus bertanggung jawab dalam memelihara taman, masyarakat juga perlu ikut berpartisipasi untuk menjaga dan memelihara taman agar dapat digunakan untuk berbagai aktivitas kegiatan masyarakat.

2. Responsibilities Subjektif

Diluar dari berbagai kewajiban yang merupakan salah satu dimensi responsibilities, bersama dengan ini juga terdapat perasaan kita sendiri, dan keyakinan tentang responsibilities itu sendiri. Responsibilities subjektif berakar pada keyakinan kita tentang kesetiaan, hati nurani, dan identifikasi. Responsibilities subjektif dalam melaksanakan peran administrasi mencerminkan jenis etika profesi yang dikembangkan melalui pengalaman pribadi. Responsibilities subjektif menyangkut

tingkat kesetiaan, nilai-nilai, dan juga karakteristik. Perasaan dan keyakinan tentang tanggung jawab kepada seseorang atau sesuatu muncul dari proses sosialisasi. Hal tersebut adalah manifestasi dari nilai-nilai, sikap, dan keyakinan yang telah kita peroleh dari keluarga, sekolah, masyarakat, agama, teman, pelatihan profesional, dan keterlibatan di dalam organisasi. Melalui pengalaman ini kita mulai melihat pola di dalam fisik dan perilaku orang lain yang menjadi bagian dari sistem kognitif kita.

Tanggung jawab subjektif berakar pada keyakinan yang menentukan dasar dalam bertindak yang kita sebut sebagai nilai-nilai, yang menjadi lebih atau kurangnya dijabarkan sebagai prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini menghubungkan nilai-nilai di dalam melakukan sesuatu. Ketika kita menghadapi masalah dan isu-isu, nilai-nilai kita, dan prinsip-prinsip yang terkait dengan mereka, menimbulkan perasaan dan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu, atau untuk mencari pemenuhan dari beberapa tujuan tertentu.

Pada Pergub DKI Jakarta No.49 Tahun 2021 taman berfungsi sebagai pelayanan anak, pelayanan masyarakat, pelayanan lansia, ruang untuk berolahraga, pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan begitu pemelihara taman wajib menciptakan taman sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab subjektif agar fungsi dari taman tersebut benar dapat digunakan.

Menurut Cooper (dalam Meutia, 2015:17) model tanggung jawab administrasi dibagi menjadi dua aspek yaitu komponen perilaku dan etika. Hal ini kemudian dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. 4 Model Responsibilitas

Perilaku responsibilitas	Etika individu
<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan individu • Struktur organisasi • Budaya organisasi • Harapan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Deliminasi dan transcendence organisasi • Hukum dan mekanisme kelembagaan untuk membatasi kekuasaan organisasi • Kesadaran diri.

Sumber : Cooper dalam Meutia (2015:17)

Adapun parameter responsibilitas menurut Jabra dan Dwivedi (Widodo, 2001:159) meliputi:

1. Pemahaman akan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga merupakan suatu wujud kesadaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Pemahaman akan tanggung jawab sangatlah penting bagi para birokrasi untuk melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat. Adanya pemahaman akan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tentu akan membantu para birokrasi publik tersebut menentukan apa saja yang menjadi pokok utama tugasnya dan konsekuensi apa yang akan diterima jika tugas yang diberikan tidak dikerjakan sesuai dengan prosedur yang ada.

2. Pemberian wewenang sesuai tanggung jawab

Pemberian wewenang yang sama besar dengan tanggung jawabnya adalah salah satu hal terpenting bagi birokrasi publik untuk melayani masyarakat. Adanya pemberian

wewenang yang sesuai dengan tanggung jawab yang diemban, diharapkan mampu menumbuhkan rasa kesadaran para birokrasi publik untuk mengambil suatu keputusan yang paling tepat. Para birokrasi publik berhak mengambil keputusan melakukan suatu tindakan namun tetap sesuai dengan batasan dan tanggung jawab yang diembankan tersebut.

3. Adanya evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja merupakan suatu metode dan proses penilaian dari pelaksanaan tugas institusi atau unit-unit kerja atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan tercapai.

4. Tindakan-tindakan yang akurat, adil, dan tepat waktu

Tindakan akurat, adil, dan tepat waktu dalam proses pemenuhan tanggung jawab yang diemban merupakan hal penting lain yang harus dilakukan oleh birokrasi publik, maksudnya adalah dalam proses melayani masyarakat, adil dalam memberikan pelayanan tanpa memandang status sosial seseorang, dan tepat waktu tanpa menunda.

5. Komitmen dari pimpinan

Komitmen pimpinan dalam suatu instansi pemerintah menjadi kunci menciptakan

layanan publik yang berkualitas. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk menguasai tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Komitmen dalam organisasi mencakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.

1.6.6 Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi sebuah item atau peralatan, atau mengembalikannya ke dalam kondisi tertentu (Dhillon, 2006:15) Kemudian dengan penekanan inti definisi yang sejalan (Ansori & Mustajib, 2013:2) di dalam bukunya mendefinisikan pemeliharaan atau *maintenance* sebagai konsepsi dari semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas fasilitas agar dapat berfungsi dengan baik seperti kondisi awal.

Menurut (Sudrajat, 2011:2), pemeliharaan atau yang lebih di kenal dengan kata *maintenance* dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang di perlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas pemeliharaan suatu fasilitas agar fasilitas tersebut dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi siap pakai. Terdapat beberapa alasan melakukan beberapa pekerjaan *maintenance*, antara lain:

1. Agar fasilitas dapat dipakai pada saat diperlukan
2. Seiring berjalannya waktu, tentunya kondisi dari suatu fasilitas yang mengalami

pemakaian, kemampuan kinerjanya lambat laun akan menurun karena tanpa *maintenance* semua fasilitas tersebut akan melemah performa dari suatu fasilitas

3. Diharapkan dapat memperpanjang umur pakai dari fasilitas tersebut

1.6.7 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka didefinisikan sebagai bagian peruntukkan penggunaan tanah dalam wilayah kota yang disediakan untuk difungsikan sebagai daerah ruang terbuka yang dapat berupa lahan terbuka hijau, lapangan, pemakaman, tegalan, persawahan dan bentuk-bentuk lainnya. Menurut Peraturan Menteri PU No.5 Tahun 2008 Ruang Terbuka Hijau Kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH menurut (Joga & Ismaun, 2011:92) merupakan suatu lahan/kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali tata air, dan lain sebagainya.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Maka dari itu diperlukan pemeliharaan RTH yang bertujuan untuk

menjaga kebersihan tamannya agar dapat terjaga fungsinya sebagai peningkatan kualitas lingkungan dan kelestarian alam sehingga bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri PU No.5 Tahun 2008 disebutkan bahwa tujuan dan fungsi dari ketersediaan RTH. Berikut adalah tujuan dari penyelenggaraan RTH, yaitu:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, indah, segar, dan bersih

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya yaitu dibagi atas:

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah)
2. Manfaat tidak langsung (jangka panjang dan bersifat *intangibile*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati)

Pada Pergub DKI Jakarta No 157 tahun 2019, bidang pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan melaksanakan pendataan, perancangan, pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman, tata hias dan ornament kota. Salah satu tugas seksi

taman kota mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, penataan, pemeliharaan dan pengawasan taman. Peran Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai pemelihara taman kota mempunyai tanggung jawab yang penting dalam mengurus segala fasilitas yang telah ada di taman kota. Berdasarkan SOP atau surat perintah kerja Sudin Pertamanan dan Hutan Kota administrasi Jakarta Timur No. 1.832.82 tanggal 30 Desember 2020, PJLP pemeliharaan RTH taman wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyapuan dan pembersihan areal taman
- b. Melakukan pemangkasan/pembabatan rumput di areal taman
- c. Melakukan pemangkasan semak dan tanaman hias
- d. Melakukan penggemburan tanah di sekitar tanaman hias
- e. Melakukan pengetrikan rumput dan tanaman penutup tanah
- f. Melakukan penyulaman dan penanaman tanaman hias, perdu dan pohon
- g. Melakukan perbanyakan/pembibitan tanaman
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan
- i. Melaporkan dan mendokumentasikan hasil pekerjaan secara berkala

Menurut Peraturan Menteri PU No.5 tahun 2008 pemeliharaan Tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemupukan

Prinsip dasar pemupukan adalah mensuplai hara tambahan yang dibutuhkan sehingga tanaman tidak kekurangan makanan. Pupuk yang diberikan pada tanaman dapat berupa pupuk organik maupun pupuk anorganik (misalnya NPK atau urea). Pupuk yang

digunakan untuk pohon-pohon taman biasanya pupuk majemuk NPK.

b. Penyiraman

Tujuan penyiraman tanaman, selain untuk menyeimbangkan laju evapotranspirasi, juga berfungsi melarutkan garam-garam mineral dan juga sebagai unsur utama pada proses fotosintesis. Waktu penyiraman pada dasarnya dapat dilakukan kapan saja saat dibutuhkan. Waktu penyiraman yang terbaik adalah pada pagi atau sore hari. Penyiraman siang hari hendaknya dilakukan langsung pada permukaan tanah, tidak pada permukaan daun tanaman. Untuk daerah dengan kelembaban tinggi penyiraman pada pagi hari lebih baik daripada sore hari, dalam upaya menghindari penyakit yang disebabkan oleh cendawan. Penetrasi air siraman sedalam 15-20 cm ke dalam tanah, dapat menjadi indikasi bahwa siraman air sudah dinyatakan cukup.

c. Pemangkasan

Tujuan pemangkasan tanaman adalah untuk mengontrol pertumbuhan tanaman sesuai yang diinginkan serta menjaga keamanan dan kesehatan tanaman. Waktu pemangkasan yang tepat adalah setelah masa pertumbuhan generatif tanaman (setelah selesai masa pembungaan) dan sebelum pemberian pupuk. Pemangkasan tanaman dapat dilakukan dengan tujuan:

1) Pemangkasan untuk kesehatan pohon

Pemangkasan untuk tujuan ini dilakukan pada cabang, dahan dan ranting yang retak, patah, mati atau berpenyakit.

2) Pemangkasan untuk keamanan penggunaan taman

- a) Pemangkasan dengan tujuan ini dilakukan pada cabang, dahan dan ranting, yang dapat mengancam keamanan pengguna taman
 - b) Di daerah pejalan kaki diperlukan ruang yang bebas dari juntaian ranting dan dahan pohon sekitar 2,5 m dari permukaan tanah
 - c) Batang atau dahan yang menyentuh kabel telepon dan listrik perlu dipangkas, karena disamping dapat mengakibatkan korsleting/ kebakaran, juga gesekan yang intensif dapat mengganggu kesehatan pohon
- 3) Pemangkasan untuk keamanan pengguna jalan
- a) Pemangkasan dengan tujuan ini dilakukan pada cabang, dahan dan ranting, yang dapat menghalangi pandangan pengguna jalan
 - b) Untuk jalan yang dilalui kendaraan pada daerah permukiman diperlukan ruang terbebas dari juntaian ranting dan dahan pohon sekitar minimal 3,5 m dari permukaan tanah
 - c) Untuk jalan umum yang dilalui kendaraan diperlukan ruang terbebas dari juntaian ranting dan dahan pohon sekitar 4,5-5 m dari permukaan tanah
- 4) Pemangkasan untuk tujuan estetis
- Pemangkasan dengan tujuan ini adalah untuk menghasilkan penampilan tanaman lebih baik atau lebih indah. Dengan memperhatikan jenis dan kerapatan daun, maka pemangkasan dapat menghasilkan tanaman dengan bentuk-bentuk tajuk spiral, silindris, kubus, bulat, piramida, dan lain sebagainya.

1.6.8 Faktor yang Mendukung dan Menghambat Responsibilitas Pemeliharaan Taman

Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah dapat diketahui keberhasilannya tercapai atau tidak apabila dilakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor – faktor yang mendukung dan menghambat terhadap pelaksanaan tugas kewajiban tersebut. Tanggung jawab terhadap kewajibannya perlu dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang sudah ada. Keberhasilan tanggung jawab pemerintah pada pemeliharaan taman publik juga bergantung pada faktor pendukung dan penghambat tersebut.

Maka dari itu sebagai bahan acuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung responsibilitas pemerintah terhadap pemeliharaan taman publik, peneliti menggunakan *review literature* jurnal berdasarkan jurnal – jurnal peneliti terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rene Sanjaya et al., 2021:101) disebutkan bahwa pada pelaksanaan pemeliharaan taman terdapat pekerjaan yang kurang dari standar disebabkan faktor sumber daya manusia yang masih kurang berkualitas karena sering menunda pekerjaan dan beristirahat pada saat jam kerja berlangsung, kemudian faktor lainnya karena kerusakan pada alat kerja dan teknik pemeliharaan yang digunakan oleh setiap gardener berbeda-beda serta adanya perbedaan kondisi lahan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Detuage et al., 2019:194) mengatakan bahwa fasilitas dan sarana taman menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pemeliharaan taman-taman tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Arlistasari & Rosdiana, 2019:1) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi responsibilitas pada penataan pemeliharaan RTH taman yaitu sumber dana yang terbatas, peralatan yang terbatas, kurangnya fasilitas dan sarana di taman tersebut sehingga taman belum terawat dan terpeliharadengan baik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Dwi S et al., 2020:47) dalam jurnal penelitian mengenai penerapan prinsip responsibilitas di layanan publik oleh pegawai saat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya diketahui bahwa fasilitas serta sarana prasarana kantor dapat mempengaruhi keberhasilan pegawai dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk melayani masyarakat dengan baik. Sama hal nya dengan jurnal penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan (Medja et al., 2020:38) menjelaskan dalam penerapan responsibilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ketersediaan sumber daya pegawai, sarana dan fasilitas kantor yang memadai serta adanya pengawasan dan sanksi yang diberikan kepada pegawai yang tidak bekerja dengan baik.

Dari jurnal – jurnal penelitian terdahulu di atas didapati bahwa untuk mendukung responsibilitas tersebut ada berbagai faktor yaitu:

1. Sumber daya manusia
2. Peralatan kerja
3. Sarana prasarana dan fasilitas
4. Sumber dana
5. Pengawasan
6. Sanksi

Faktor-faktor tersebut didapat dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya menurut (Arlistasari & Rosdiana, 2019; Detuage et al., 2019; Dwi S et al., 2020; Medja et al., 2020; Rene Sanjaya et al., 2021) dalam pelaksanaan tugasnya menjadi faktor pendukung maupun penghambat untuk melihat keberhasilan dari pertanggungjawaban sebuah organisasi.

Dari jurnal – jurnal penelitian terdahulu tersebut sebagai acuan untuk menganalisis faktor yang dapat mendukung dan menghambat responsibilitas pegawai dalam pemeliharaan taman maka peneliti berasumsi dengan menggunakan beberapa faktor yang akan digunakan saat penelitian yaitu:

1. Sumber daya manusia yang terdapat pada Sudin Pertamanan dan Hutan Kota untuk mencapai responsibilitas dalam pemeliharaan taman publik Kecamatan Duren Sawit
2. Anggaran biaya yang dibutuhkan Sudin Pertamanan dan Hutan Kota untuk pemeliharaan taman publik Kecamatan Duren Sawit
3. Sarana prasarana dan fasilitas taman yang dimiliki perlu dipelihara agar tercapai responsibilitas dari Sudin Pertamanan dan Hutan Kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
4. Peralatan taman yang akan digunakan untuk pemeliharaan taman Kecamatan Duren Sawit

Faktor-faktor tersebut digunakan untuk menjadi pendukung dan penghambat dari keberhasilan responsibilitas pegawai dalam melakukan pemeliharaan taman publik di

Kecamatan Duren Sawit. Penjelasan dari faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang terdapat pada Sudin Pertamanan dan Hutan Kota untuk mencapai responsibilitas dalam pemeliharaan taman publik

Menurut Soemarsono pada manajemen portal (Kementerian Keuangan RI, 2018) menjelaskan bahwa sumber daya manusia sangat penting untuk diutamakan dan diperhatikan pengelolaannya baik untuk ketersediannya maupun kompetensi atau kemampuannya. Jumlah SDM sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiennya penyelesaian pekerjaan serta kompetensi atau kemampuan SDM merupakan hal yang penting pula dalam mendukung capaian dan sasaran organisasi.

Menurut (Gibson et al., 2012:10), kinerja individu atau manusia merupakan fondasi dari kinerja suatu organisasi begitu juga dengan efektivitas suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku manusianya. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting untuk pencapaian tujuan manajemen yang efektif. Kinerja organisasi bergantung pada kinerja individunya sehingga para pemimpin harus memiliki penentu kinerja untuk setiap SDM. Sebuah organisasi tidak bisa mengabaikan kebutuhan untuk memperoleh dan bertindak berdasarkan pengetahuan tentang karakteristik sumber daya manusianya. Pengamatan dan analisis terhadap perilaku dan kinerja SDM memerlukan pertimbangan variabel yang secara langsung mempengaruhi perilaku individu atau apa yang sudah dilakukan SDM tersebut. Dalam hal ini variabel individual tiap SDM mencakup kemampuan atau keterampilan, kepribadian, dan pengalaman yang mempengaruhi perilaku setiap pegawai.

Dari penjelasan di atas maka perlu diperhatikan keterlibatan sumber daya manusia yang dimiliki Sudin Pertamanan dan Hutan Kota untuk memenuhi tanggung jawab dalam pemeliharaan taman yaitu berdasarkan:

- 1) Kuantitas SDM yang dapat mendukung tanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan taman
 - 2) Kemampuan atau keterampilan setiap individu yang dimiliki untuk mendukung tanggung jawab dalam pemeliharaan taman
 - 3) Pengalaman yang dimiliki setiap individu yang dapat mempengaruhi tanggung jawab terhadap kinerjanya
 - 4) Kepribadian setiap individu dalam menjalankan tugas pekerjaannya
2. Anggaran biaya yang dibutuhkan Sudin Pertamanan dan Hutan Kota untuk pemeliharaan taman publik Kecamatan Duren Sawit

Anggaran menurut (Nafarin, 2015:5) merupakan alat manajemen yang sangat bermanfaat bagi manajemen dalam melaksanakan dan mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Selain itu, menurut (Munandar, 2013:1) biaya anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam satuan keuangan (unit moneter) dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Menurut (Mardiasmo, 2009:62) menjelaskan anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran merupakan alat akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Abdul & Kusufi, 2014:17). Menurut (Mardiasmo, 2009:61) penyusunan biaya anggaran penting dilakukan karena untuk memenuhi prioritas belanja yang akan dilakukan pemerintah serta meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas.

(Mardiasmo, 2009:66) membagi jenis-jenis biaya anggaran pada sector publik menjadi dua, yaitu:

1) Anggaran operasional

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin merupakan pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah. Hal ini disebut rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Dalam hal ini pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan.

2) Anggaran modal

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot. Belanja modal atau investasi adalah

pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Selain itu pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh (Sufriadi & Zakaria, 2021:65) menjelaskan bahwa dalam suatu program atau kegiatan pemerintah perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa sumbangan tenaga (*inkind*) dan sumbangan uang (*incash*). Dengan adanya partisipasi tersebut maka masyarakat akan ikut terlibat langsung dan aktif dalam kegiatan pemerintah tersebut.

Oleh karena itu, anggaran biaya menjadi unsur yang penting untuk keberjalanan suatu organisasi, pada Sudin Pertamanan dan Hutan Kota diperlukan anggaran biaya untuk pemeliharaan taman yaitu sebagai berikut:

- a. Pengeluaran belanja operasional yang direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemeliharaan taman
 - b. Pengeluaran belanja modal untuk menambah aset pemerintah dalam melakukan pemeliharaan taman
 - c. Partipasi masyarakat dalam melakukan pemeliharaan taman berupa sumbangan *inkind* dan *incash*
3. Fasilitas dan sarana prasarana taman yang dimiliki perlu dipelihara untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

Taman sebagai ruang publik perlu untuk diperhatikan keindahannya,

kenyamanan, dan keamanannya karena ketiga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesenangan dari masyarakat pengunjung (Pradipta et al., 2018:199). Kemudian taman-taman tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan banyak aktivitas kegiatan disana seperti berolahraga, rekreasi, taman bermain anak, penunjang kesehatan, kegiatan usaha, dan sebagai tempat untuk masyarakat pengunjung bersantai serta merasa aman dan nyaman saat berada disana sehingga pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas taman perlu diperhatikan untuk mendukung berbagai kegiatan tersebut, karena hal itu maka kenyamanan dan keamanan menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat saat mengunjungi taman (Wibowo & Ritonga, 2016:161).

Selain itu dalam Peraturan Menteri PU No. 5 Tahun 2008 disebutkan bahwa sebuah taman harus memiliki aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat baik itu untuk pejalan kaki maupun pengendara bermotor. Hal ini perlu untuk diperhatikan agar masyarakat merasa senang karena kemudahan akses menuju taman tersebut sehingga taman-taman itu semakin sering dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat. Kemudian, karena taman tersebut sering dikunjungi maka kebersihan dan keindahan taman perlu untuk dijaga dan dipelihara agar masyarakat merasa nyaman dan betah berada lama di taman tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan dari adanya sebuah taman yaitu memiliki sarana prasarana dan fasilitas taman untuk lansia, pada Undang-Undang No.13 Tahun 1998 menyebutkan bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia

maka diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yaitu kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum. Menurut (Agnesti S et al., 2019:2861), aktivitas fisik yang dilakukan oleh lansia seperti olahraga memiliki banyak sekali manfaat yang diperoleh diantaranya dapat membuat fisiologis lansia menjadi lebih baik. Olahraga dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat, meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, kekuatan, dan dapat mencegah atau membantu menyembuhkan suatu penyakit tertentu.

Dari beberapa jurnal tersebut (Agnesti S et al., 2019; Pradipta et al., 2018; Wibowo & Ritonga, 2016) didapati bahwa dalam suatu taman perlu adanya sarana prasarana dan fasilitas taman untuk kesehatan lansia, untuk keamanan dan kenyamanan, aktivitas olahraga dan taman bermain anak, agar semua sarana prasarana dan fasilitas taman itu terjaga maka penting untuk dilakukan pemeliharaan terhadap sarana prasarana dan fasilitas tersebut serta menjaga kebersihan taman tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dari Suidin Pertamanan dan Hutan Kota.

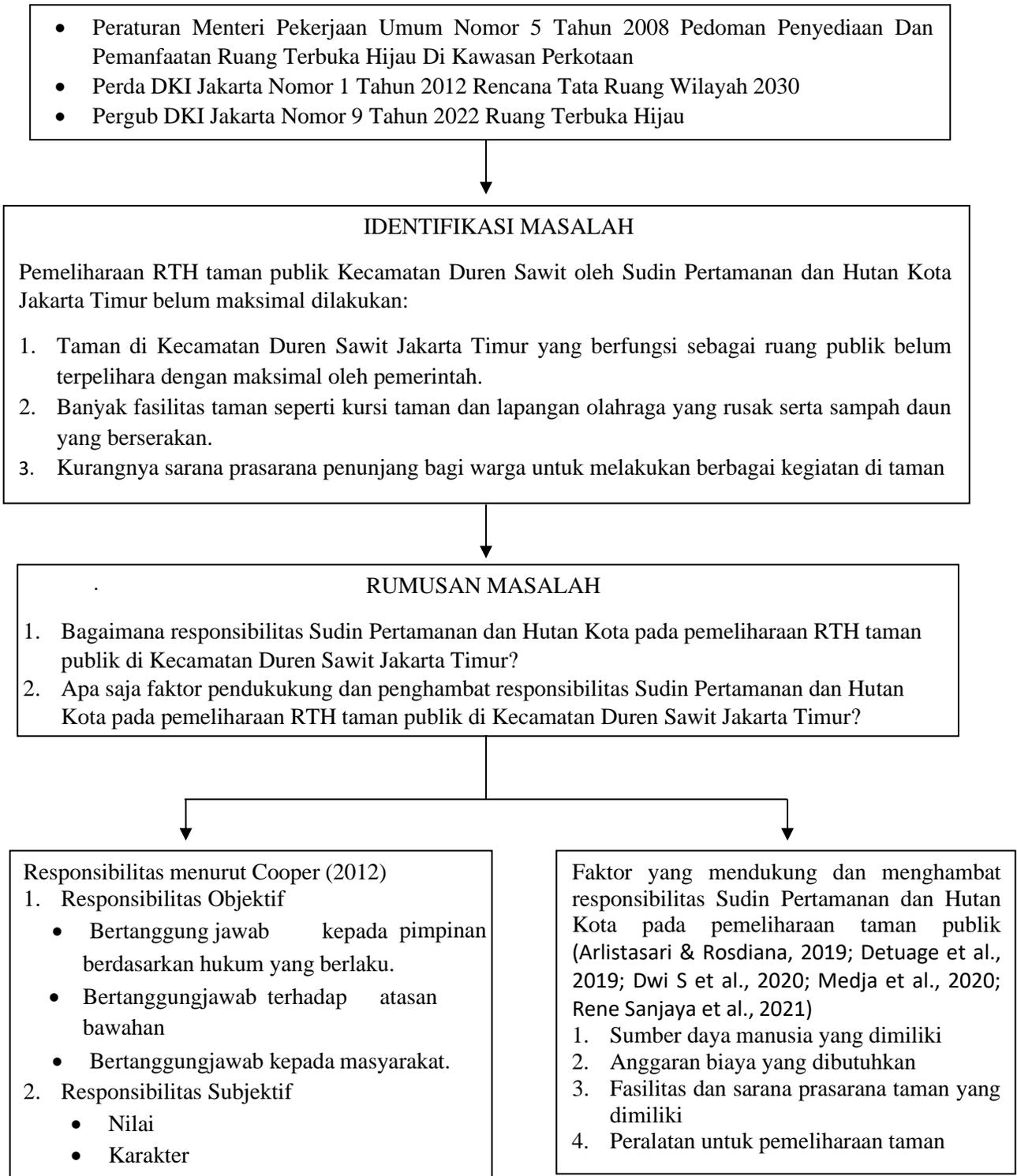
4. Peralatan taman yang akan digunakan untuk pemeliharaan taman Kecamatan Duren Sawit

Sebuah taman sangat perlu dilakukan pemeliharaan karena untuk menjaga kenyamanan pengunjung dan keindahan pada taman tersebut. Pemeliharaan taman yang dimaksud adalah untuk menjaga dan merawat areal taman dengan fasilitas yang ada di dalamnya agar kondisinya tetap baik dan sedapat mungkin mempertahankan keadaan yang sesuai dengan desain semula (Rene Sanjaya et al., 2021:94).

Pemeliharaan taman dilakukan dengan menjaga kebersihan taman, pemupukan, penyiraman, penyiangan rumput dan tanaman liar, serta pemangkasan tanaman. Menurut (Aldiguna et al., 2019:206) sebuah taman perlu mendapat pemeliharaan karena kebersihan juga mempengaruhi keindahan, kenyamanan, dan keamanan pengunjung, maka dari itu penggunaan peralatan kerja yang tepat penting untuk diperhatikan agar dapat mendukung pemeliharaan dari taman tersebut (Arifin & Arifin, 2005:16).

Selain peralatan kerja untuk pemeliharaan taman, peralatan yang mendukung untuk keamanan dan keselamatan petugas saat memelihara taman juga perlu diperhatikan karena menurut (Konya et al., 2013:171) mengungkapkan bahwa setiap tahun, ratusan orang terluka akibat kecelakaan kerja maka dari itu pentingnya bagi petugas untuk menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk meminimalisir dampak atau bahkan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Penggunaan APD yang tepat akan memberikan perlindungan optimal pada penggunanya. Oleh karena itu, penggunaan APD memiliki peran penting dalam penerapan sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang baik. Dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang K3, dimana setiap pengurus perusahaan atau organisasi wajib menyediakan alat perlindungan diri secara cuma-cuma terhadap tenaga kerja. Dalam hal ini peralatan kerja untuk keamanan dan keselamatan petugas pemelihara taman wajib diperhatikan oleh Sudin Pertamanan dan Hutan Kota agar saat mengerjakan pekerjaannya kondisi keamanan semua petugas pemelihara terjamin dan terhindar dari bahaya kecelakaan kerja.

Dari jurnal-jurnal yang disebutkan sebelumnya (Aldiguna et al., 2019; Arifin & Arifin, 2005; Konya et al., 2013; Rene Sanjaya et al., 2021) didapati bahwa untuk mencapai responsibilitas dalam pemeliharaan taman maka penting untuk memperhatikan pemenuhan peralatan kerjanya agar dapat mendukung keberhasilan dari kegiatan pemeliharaan taman tersebut maka diperlukan peralatan kerja untuk pemupukan, peralatan untuk kegiatan penyiraman, peralatan untuk kegiatan pemangkasan, peralatan kerja untuk kegiatan penyiangan, dan peralatan kerja untuk keselamatan petugas dalam memelihara taman tersebut. Hal-hal tersebut wajib dipenuhi oleh Sudin Pertamanan dan Hutan Kota agar tugas pemeliharaan taman tersebut dapat terpenuhi dengan baik.



Gambar 1. 8 Kerangka Berpikir Penelitian

1.7 Operasional Konsep

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, konsep penelitian ini akan dilihat dari tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan RTH taman publik. Berikut beberapa operasional konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1.7.1 Tanggung Jawab Pemerintah dan Hutan Kota dalam Pemeliharaan RTH taman publik

Merupakan suatu tanggung jawab atas kewajiban untuk menjaga atau mempertahankan kualitas RTH taman publik agar fasilitas tersebut dapat berfungsi dengan baik. Dalam penelitian ini untuk melihat keberhasilan dari tanggung jawab pemerintah maka menggunakan konsep tanggung jawab menurut Cooper sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Objektif

Fenomena ini nantinya akan melihat pertanggungjawaban seseorang atas badan kolektif dan tugas-tugas tertentu, bawahan, serta terhadap pencapaian tujuan yang kemudian dapat dilihat dari tiga macam pelaksanaan kewajiban untuk pemenuhan tanggung jawab yaitu:

- 1) Pemenuhan tanggung jawab kepada pimpinan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar pelaksanaan yang berlaku
 - a) SOP menjadi dasar pelaksanaan pemeliharaan taman
 - b) Wujud keberhasilan pemeliharaan taman sesuai standar pelaksanaan
 - c) Penilaian kinerja sesuai standar profesional
- 2) Pemenuhan tanggung jawab terhadap atasan dan bawahan dalam menjalankan

tugas dan perannya

- a) Peran dan tugas dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan struktur berjenjang organisasi
 - b) Penilaian dan pengawasan dalam melakukan tugas
 - c) Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran
- 3) Pemenuhan tanggung jawab Sudin Pertamanan dan Hutan Kota dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat
- a) Respon dan peran masyarakat terhadap pemeliharaan taman
 - b) Perizinan dan pengaduan yang dilakukan masyarakat

2. Responsibilitas Subjektif

Fenomena ini nantinya akan melihat pemenuhan tanggung jawab berdasarkan etika dalam bertugas, yang dapat dilihat melalui:

- 1) Pemenuhan tanggung jawab Sudin Pertamanan dan Hutan Kota dalam mewujudkan nilai manfaat taman bagi masyarakat
 - a) Sudin Pertamanan dan Hutan Kota menciptakan taman sebagai tempat pelayanan masyarakat untuk anak dan lansia
 - b) Sudin Pertamanan dan Hutan Kota menciptakan taman sebagai ruang untuk berolahraga
 - c) Sudin Pertamanan dan Hutan Kota menciptakan taman sebagai tempat pelayanan usaha

- 2) Pemenuhan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan berdasarkan karakter yang dimiliki Sudin Pertamanan dan Hutan Kota
 - a) Sikap dan perilaku setiap individu dalam menjalankan pekerjaan

1.7.2 Faktor yang mendukung dan menghambat responsibilitas Sudin Pertamanan dan Hutan Kota

Faktor ini adalah hal-hal yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan dari responsibilitas Sudin Pertamanan dan Hutan Kota dalam memeliharaa taman publik sehingga di dalam penelitian ini memungkinkan akan dilihat dari faktor-faktor:

1. Pemenuhan sumber daya manusia yang dimiliki Sudin Pertamanan dan Hutan Kota untuk mencapai responsibilitas dalam pemeliharaan taman publik
 - a) Kuantitas SDM yang mendukung responsibilitas dalam melakukan pemeliharaan taman
 - b) Kemampuan dan pengalaman yang dimiliki individu untuk mendukung responsibilitas dalam pemeliharaan taman
2. Pemenuhan tanggung jawab atas anggaran biaya yang dibutuhkan Sudin Pertamanan dan Hutan Kota untuk memenuhi responsibilitas dalam pemeliharaan taman publik
 - a) Sumber anggaran biaya untuk pemeliharaan taman
 - b) Pengeluaran biaya untuk memenuhi responsibilitas dalam menjalankan pemeliharaan taman
 - c) Partipasi masyarakat dalam melakukan pemeliharaan taman berupa sumbangan *inkind* dan *incash*

3. Pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana taman yang dimiliki terpelihara oleh Sudin Pertamanan dan Hutan Kota untuk mendukung tanggung jawab pemeliharaan taman publik
 - a) Pemenuhan fasilitas, sarana prasarana taman untuk masyarakat
 - b) Pemenuhan fasilitas, sarana prasarana taman untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat yang berkunjung
4. Pemenuhan peralatan kerja yang digunakan untuk memenuhi tanggung jawab pemeliharaan taman publik
 - a) Ketersediaan peralatan yang digunakan untuk kegiatan pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan tanaman
 - b) Ketersediaan peralatan yang digunakan petugas untuk keselamatan kerja

Tabel 1. 5 Operasional Konsep

Fokus Penelitian	Variabel	Fenomena Penelitian	Indikator yang diamati
Responsibilitas pemerintah dalam memelihara taman publik di kecamatan duren sawit jakarta timur	Responsibilitas objektif	Pemenuhan tanggung jawab kepada pimpinan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar pelaksanaan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan SOP menjadi dasar dalam pelaksanaan pemeliharaan taman publik • Wujud keberhasilan pemeliharaan taman publik sesuai standar pelaksanaan • Penggunaan standar penilaian kinerja sesuai dengan standar profesional yang dilakukan dalam Sudin Pertamanan dan Hutan Kota

		Pemenuhan tanggung jawab terhadap atasan dan bawahan dalam menjalankan tugas dan perannya	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggungjawaban dalam mengerjakan pekerjaan sesuai dengan peran berdasarkan struktur berjenjang organisasi • Pelaksanaan pengawasan dan penilaian dalam melakukan tugas di Sudin Pertamanan dan Hutan Kota • Pemberian sanksi sebagai penindakan agar dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada
		Pemenuhan tanggung jawab Sudin Pertamanan dan Hutan Kota dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Respon dan peran masyarakat mengenai pemeliharaan taman yang dilakukan Sudin Pertamanan • Proses perizinan dan pengaduan yang dilakukan masyarakat terhadap taman
	Responsibilitas subjektif	Pemenuhan tanggungjawab Sudin Pertamanan dan Hutan Kota dalam mewujudkan nilai manfaat taman bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan fungsi taman sebagai tempat pelayanan masyarakat untuk anak dan lansia • Menciptakan taman sebagai ruang untuk berolahraga bagi masyarakat • Menciptakan taman sebagai tempat pelayanan usaha untuk membantu perekonomian masyarakat

Fokus Penelitian	Variabel	Fenomena Penelitian	Indikator yang diamati
		Pemenuhan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan berdasarkan karakter yang dimiliki Sudin Pertamanan dan Hutan Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Sikap dan perilaku yang dimiliki setiap individu dalam menjalankan pekerjaan di Sudin Pertamanan dan Hutan Kota
Faktor yang mendukung dan menghambat tanggung jawab Sudin Pertamanan dan Hutan Kota	Faktor pendukung dan penghambat tanggung jawab	Pemenuhan sumber daya manusia yang dimiliki Sudin Pertamanan dan Hutan Kota untuk mencapai tanggung jawab dalam pemeliharaan taman publik	<ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan jumlah pekerja yang dapat melakukan fungsi pemeliharaan taman • Kemampuan dan pengalaman yang dimiliki pekerja untuk mendukung tanggung jawab pemeliharaan taman
		Pemenuhan tanggung jawab atas anggaran biaya yang dibutuhkan Sudin Pertamanan dan Hutan Kota untuk memenuhi tanggung jawab dalam pemeliharaan taman publik	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber anggaran yang digunakan untuk memenuhi tanggung jawab pemeliharaan taman • Pengeluaran biaya untuk pemenuhan pemeliharaan taman • Keikutsertaan peran masyarakat dalam melakukan pemeliharaan taman berbentuk <i>sumbangan inkind</i> dan <i>incash</i>
		Pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana taman yang dimiliki terpelihara oleh Sudin Pertamanan dan Hutan Kota untuk mendukung tanggung jawab pemeliharaan taman publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan fasilitas, sarana prasarana pada taman yang dapat digunakan masyarakat • Pemenuhan fasilitas, sarana prasarana pada taman untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat yang berkunjung

Fokus Penelitian	Variabel	Fenomena Penelitian	Indikator yang diamati
		Pemenuhan peralatan kerja yang digunakan untuk memenuhi tanggung jawab pemeliharaan taman publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan peralatan kerja untuk mendukung kegiatan pemupukan, penyiraman dan pemangkasan tanaman • Pemenuhan peralatan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas pemelihara taman

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

(Sugiyono, 2019:4) mengatakan bahwa jenis penelitian dapat diklasifikasikan menurut metode, tujuan, tingkat eksplanasinya dan dapat pula diklasifikasikan menurut tingkat kealamiah objek yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2019:9) metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang meneliti kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci. Sedangkan pengertian penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2019:13) adalah data yang sudah terkumpul berbentuk kata maupun gambar, sehingga tidak berbentuk angka.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pemerintah serta faktor yang mendukung tanggung jawab dalam memelihara taman publik di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2018:4) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati. Adapun penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Jakarta Timur dan taman yang ada di Kecamatan Duren Sawit. Hal ini didasarkan karena instansi tersebut merupakan instansi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan melakukan pengelolaan terhadap pemeliharaan taman yang ada di Kecamatan Duren Sawit.

1.8.3 Subjek Penelitian

(Moleong, 2018:132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan *key informan* yaitu *purposive*. Menurut (Sugiyono, 2019:85) teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan penulis menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan subjek penelitian dengan pihak-pihak yang bertugas sebagai pemelihara taman. Subjek penelitian dipilih guna untuk memperoleh data dan informasi terkait responsibilitas pemerintah terhadap pemeliharaan RTH

taman publik di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Maka peneliti menentukan subjek penelitian sebagai berikut:

1. Kepala seksi taman Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur
2. Pegawai seksi taman Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur
3. Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan Duren Sawit
4. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pemelihara taman di Kecamatan Duren Sawit
5. Warga yang menggunakan taman publik di Kecamatan Duren Sawit

1.8.4 Jenis Data

(Sugiyono, 2019:13) menjelaskan jenis data dalam penelitian terdiri dari data kuantitatif, kualitatif, dan gabungan diantara keduanya. Data kualitatif merupakan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, serta tulisan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dimana peneliti berperan sebagai instrumen itu sendiri. (Moleong, 2018:157) mengemukakan 4 (empat) jenis data yang terdapat dalam penelitian kualitatif, yaitu kata-kata atau tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik.

Dalam penelitian responsibilitas Sudin Pertamanan dan Hutan Kota dalam pemeliharaan RTH taman publik Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur menggunakan jenis data kualitatif yaitu dengan menggunakan kata-kata untuk dianalisis, sumber data tertulis, dan penulis sendiri sebagai instrumennya.

1.8.5 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Moleong, 2018:255).

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019:184). Data primer dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang ada pada Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur dan warga yang menggunakan RTH taman publik, selain itu data diperoleh dengan menggunakan FGD (*focus group discussion*).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2019:187). Data ini diperoleh dengan cara mengambil data dari buku, jurnal, artikel, berita dalam situs-situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2019:227) teknik pengumpulan dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumen.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Observasi dilakukan pada obyek penelitian yang akan diteliti sebagai sumber data. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yang berguna untuk mengungkap data mengenai tanggung jawab Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam pemeliharaan RTH taman publik Kecamatan Duren Sawit. Peneliti melakukan observasi langsung ke taman yang terdapat pada tujuh kelurahan Kecamatan Duren Sawit sebanyak empat kali dan saat di taman publik peneliti menemukan taman yang kotor karena sampah daun kering dan terdapat beberapa fasilitas taman seperti kursi taman, lampu taman, dan jalan untuk *jogging track* sudah ada yang rusak. Selain itu saat melakukan observasi, peneliti bertemu dengan kepala satuan pelaksana Kecamatan Duren Sawit yang sedang mengawasi pekerjaan petugas pemelihara taman PJLP yang sedang melakukan kegiatan pemangkasan dan penyapuan taman. Dari kegiatan observasi tersebut peneliti menemukan permasalahan pada taman publik yang kurang terpelihara tersebut serta penelitian ini menganalisis, meninjau dan menuliskan mengenai tanggung jawab Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam pemeliharaan RTH taman publik di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh data atau keterangan yang bertujuan untuk mendapatkan data penelitian dengan cara bertanya secara langsung dengan responden yang menggunakan panduan untuk wawancara. Teknik wawancara

yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara tidak terstruktur, menurut (Sugiyono, 2019:231) merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun serta sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Di sini, peneliti melakukan wawancara dengan enam informan yaitu Kepala Seksi taman dan hutan kota Jakarta Timur, dua Pegawai Seksi taman dan hutan kota, Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan Duren Sawit, Petugas pemelihara taman PJLP, dan warga yang menggunakan taman publik.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2019:240). Dokumen yang digunakan dapat berbentuk peraturan, kebijakan, hasil rapat, dan foto. Dokumen yang digunakan pada penelitian *Responsibilitas Sudin Pertamanan dan Hutan Kota dalam Pemeliharaan RTH Taman Publik di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur* yaitu peraturan Menteri PU mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kawasan perkotaan, Peraturan DKI Jakarta tentang rencana tata ruang wilayah 2030, Peraturan Gubernur DKI Jakarta mengenai ruang terbuka hijau serta organisasi dan tata kerja dinas pertamanan dan hutan kota. Selain itu penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur yaitu SOP pelaksanaan kerja yang mengacu pada Peraturan Gubernur No. 157 Tahun 2019, Buku Harian Lapangan (BHL) serta dokumentasi berupa foto kegiatan pemeliharaan taman serta kondisi taman dan fasilitas pada taman di Kecamatan Duren Sawit.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan meringkas data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumen, serta studi kepustakaan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, mendeskripsikan unit yang ada, mensintesis, dan menyusunnya. Analisis data dalam studi kualitatif dilakukan sebelum masuk ke lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai lapangan. Spradley dalam (Sugiyono, 2019:253) mengemukakan beberapa teknik analisis data yaitu analisis domain, analisis struktur taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis komponensial. Merupakan analisis yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan pertanyaan yang berlawanan. Analisis komponensial menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi sedangkan untuk mencari datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumen. Dalam analisis komponensial ini nantinya terdapat banyak dimensi spesifik yang berbeda di setiap elemen. Dalam penelitian ini akan melihat keberhasilan responsibilitas Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dengan mencari fenomena-fenomena untuk mengidentifikasi masalah dalam penelitian. Kemudian peneliti menganalisis permasalahan dalam penelitian tersebut dan membuat pertanyaan-pertanyaan setiap sasaran dengan mengelompokkan tiap komponen yang akan dianalisis dalam bab pembahasan. Komponen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu responsibilitas objektif dan subjektif. Keduanya memiliki perbedaan dalam melihat tanggung jawab seseorang, responsibilitas objektif mencakup hal-hal eksternal dari luar diri pribadi dalam melakukan tanggung jawabnya

menjalankan tugas dan peran. Sedangkan responsibilitas subjektif pemenuhan tanggung jawab berdasarkan keyakinan, nilai, dan bagian dari diri seseorang. Responsibilitas objektif melihat pemenuhan tanggung jawab kepada pimpinan dalam menjalankan pekerjaan sesuai regulasi atau ketentuan yang berlaku, pemenuhan tanggung jawab terhadap atasan dan bawahan dalam menjalankan tugas dan perannya, serta pemenuhan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kepada masyarakat. Sementara itu, responsibilitas subjektif melihat pemenuhan tanggung jawab Sudin Pertamanan dan Hutan Kota berdasarkan nilai dan karakter. Selain dari kedua komponen tersebut untuk mengetahui keberhasilan responsibilitas Sudin Pertamanan dan Hutan Kota dalam pemeliharaan taman maka diperlukan faktor pendukung dan penghambat yaitu SDM, anggaran biaya, fasilitas sarana dan prasarana, serta peralatan pemeliharaan taman yang digunakan untuk melihat dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab Sudin Pertamanan dan Hutan Kota. Berdasarkan komponen-komponen tersebut maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran pada penelitian ini.

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Pemeriksaan terhadap keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh (Sugiyono, 2019:268). Kebenaran data dapat dilakukan dengan cara triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma (1986) (Sugiyono, 2019:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini kualitas data diuji menggunakan triangulasi sumber data, metode ini digunakan untuk menemukan data yang orisinil, hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah ada dengan beberapa sumber yang diperoleh. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber data kemudian diolah menjadi satu kesimpulan data yang berkaitan dengan penelitian tanggung jawab Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam pemeliharaan RTH taman publik di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Sumber-sumber data yang digunakan dari jurnal penelitian terdahulu, peraturan atau kebijakan, berita, dan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan pemeliharaan RTH taman publik.